



# Kabarano

April - Juni 2019

Edisi pertama kabarano periode April - Juni 2019 mewartakan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta kegiatan-kegiatan diluar pemeriksaan.

Periode Januari - Maret 2019 ditandai dengan pelaksanaan peringatan Rakor Bersama BPK, Penyerahan LHP, Kunjungan DPD RI dan Bantuan Korban Banjir.

## Rakor Bersama, BPK Sultra, KPK



Kendari, Rabu (24/04), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sultra mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pemerintah

Daerah Provinsi Sultra guna mengoptimalkan tindaklanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK yang bersifat administratif maupun yang berindikasi kerugian negara.

Kepala Perwakilan BPK Sultra, Hermanto mengungkapkan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan terkait lambannya tindak lanjut temuan BPK, termasuk temuan yang berindikasi tindak pidana dan menimbulkan kerugian negara. Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di antaranya berisi beragam temuan dan rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara. Sayangnya, tindak lanjut atas rekomendasi itu terbilang masih rendah. Diungkapkan bahwa terdapat dua jenis rekomendasi BPK yaitu rekomendasi yang bersifat finansial dan non- finansial. Rekomendasi yang bersifat finansial jika belum ditindaklanjuti dalam rentang waktu 60 hari, maka BPK berdasarkan undang-undang berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH).

## BPK Sultra Terima Penyampaian

Senin (29/04), Dilaksanakan Penyampaian Laporan Keuangan oleh pemerintah daerah kepada BPK yang merupakan penyerahan laporan keuangan pada tahap II yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe; Kolaka Timur; Konawe Kepulauan; Muna Barat dan Buton Selatan. Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018, khususnya pada kelancaran penyediaan berkas dan dokumen pendukung pemeriksaan serta menjaga kelancaran proses komunikasi dan konfirmasi serta melakukan pengendalian keberadaan para pengelola keuangan pemerintah daerah selama proses pemeriksaan dilaksanakan.



## BPK Sultra Laksanakan Pemeriksaan dan Konsinyering Pelaporan Hasil Pemeriksaan



Bertepatan di aula, BPK Perwakilan Provinsi Sultra melaksanakan konsinyering dari hasil Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menentukan kelayakan opini pada pemerintah daerah terperiksa.

Sebagaimana diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Sultra, Hermanto, pada acara pembukaan konsinyering pelaporan atas hasil pemeriksaan LKPD TA 2018, Senin (29/04) bahwa pelaksanaan konsinyering dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan dengan mempersiapkan bahan atau materi pembahasan yang meliputi daftar usulan koreksi dan worksheet laporan keuangan hingga pada tahap perumusan opini serta adanya proses secara berjenjang dalam melaksanakan reviu opini yang telah di tetapkan.

Opini atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa dan tim pembahas mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada (i) kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dengan memperhatikan kriteria pemberian opini tersebut, pada dasarnya terdapat dua kondisi yang menentukan opini, yaitu pembatasan lingkup pemeriksaan atau kecukupan bukti; dan penyimpangan dari prinsip akuntansi/salah saji. Kedua hal tersebut harus dikaitkan dengan tingkat materialitas dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan (pervasiveness).



## BPK Sultra Peringati Hari Lahir



“Melalui upacara hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2019, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi “politik harapan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua harus terus-menerus secara konsisten merealisasikan pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia. Kita bersatu membangun bangsa untuk merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.” Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPK Sultra, Hermanto, dalam pelaksanaan upacara hari lahir pancasila yang berlangsung di Aula BPK Sultra, Sabtu (01/06). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan juga mengapresiasi atas pencapaian etos kerja pegawai dalam suasana dipenghujung bulan ramadhan.

## Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018



Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, Pukul 14:00 WITA dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyerahan dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK (Pejabat Eselon I BPK) Bapak Laode Nusriadi, SE., MSi., CPA, Ak., CA. kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak H. Abdurrahman Shaleh, SH. MSi., dan Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak H. Ali Mazi, SH. Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2017, BPK memberikan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk yang enam kali secara berturut-turut.

Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Namun masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD Bahteramas Belum Tertib Terdapat Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemprov Sultra pada PD Percetakan Sultra Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belanja Jasa Konsultansi Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan. Lebih lanjut Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gubernur Sulawesi Tenggara, yang telah mendukung upaya BPK dalam menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

## Terjang Rintangan, BPK Sultra Bantu Korban Bencana



Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, serta membantu meringankan beban para korban bencana banjir, BPK Perwakilan Sultra membentuk tim penyaluran bantuan yang bersumber dari kantor pusat maupun dari kantor perwakilan hasil dari kepedulian segenap keluarga besar BPK Perwakilan Sultra dengan turun langsung ke lokasi bencana yang dipimpin langsung oleh kepala perwakilan, Hermanto, Kamis (13/06). Kondisi infrastruktur jalan, jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah tidak menyurutkan langkah tim relawan BPK Sultra untuk menyampaikan berbagai bantuan yang telah dikumpulkan dan diharapkan dapat membantu kebutuhan yang sangat mendesak dari para korban bencana.

Bencana Banjir yang menimpa di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara telah menyebabkan banyak bangunan dan pemukiman warga rata dengan air, akses listrik dan sinyal komunikasi pun terputus. Sehingga beberapa titik di wilayah korban bencana menjadi terisolasi, infrastruktur jalan dan jembatan penghubung juga terganggu. Ribuan korban bencana banjir masih bermukim di lokasi pengungsian sejak dua minggu terakhir yang tersebar di beberapa wilayah. Berbagai kebutuhan bantuan untuk sekedar melanjutkan hidup di lokasi pengungsian menjadi sangat mendesak diantaranya berupa air bersih, bahan makanan, selimut, pakaian, dan berbagai kebutuhan lain. Wilayah di tiga kabupaten yaitu Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan menjadi daerah yang paling terkena dampak bencana banjir.



## BPK Sultra Terima Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI

Kepala Perwakilan BPK Sultra beserta para pejabat struktural dan fungsional menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI yang terdiri atas 10 anggota, Jumat (31/5/2019). Komite IV DPD RI merupakan komite kerja yang membidangi APBN; Pajak dan pungutan lain; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; lembaga keuangan dan perbankan; Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; statistik, Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan keuangan; dan investasi dan penanaman modal. Terkait dengan BPK, saat ini komite IV DPD RI sedang mempersiapkan penyusunan materi Tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas pula berbagai masukan terkait tugas pokok dan fungsi BPK perwakilan pada wilayah timur termasuk berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam kunjungan DPD RI yang dipimpin oleh Dr. H. Ajiep Padindang, mengungkapkan bahwa kegiatan kunjungan kerja Komite IV ke BPK Sultra bertujuan untuk menindak lanjuti setiap hasil pemeriksaan BPK, selain itu juga akan mengevaluasi bagaimana penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan



BPK khususnya hasil pemeriksaan semester II dan laporan pemeriksaan keuangan tahun 2018 lalu. Komite IV DPD RI menilai secara keseluruhan pemerintah daerah dalam wilayah pemeriksaan BPK Sultra telah cukup baik melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan melalui upaya BPK Sultra dalam mendorong pencapaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.